

MEMBANGUN KESADARAN KRITIS WARGA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI FORUM DISKUSI MASYARAKAT DI KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR

Rosmini

Ilmu Administrasi Negara, Fisip, UPRI Makassar

Rosmini028@gmail.com

ABSTRAK

Kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik merupakan elemen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Namun, tingkat literasi kebijakan masyarakat di tingkat lokal sering kali masih rendah, sehingga partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan cenderung pasif. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis warga melalui pembentukan dan pengelolaan forum diskusi masyarakat di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendidikan kritis ala Paulo Freire, dengan metode pelatihan, diskusi terfokus (FGD), dan simulasi advokasi kebijakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum diskusi efektif sebagai ruang dialogis untuk mendorong pemahaman warga terhadap isu-isu kebijakan dan meningkatkan keberanian dalam menyampaikan pendapat secara konstruktif. Kegiatan ini menunjukkan potensi replikasi untuk wilayah lain dalam memperkuat partisipasi demokratis di tingkat akar rumput.

Kata kunci: kesadaran kritis, kebijakan publik, partisipasi warga, forum diskusi, pendidikan kritis

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik merupakan landasan utama dari sistem demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi warga sering kali terbatas pada tingkat formalitas, tanpa keterlibatan yang substantif dalam proses penyusunan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman warga terhadap substansi kebijakan dan minimnya ruang dialog publik yang inklusif (Pateman, 1970).

Di wilayah Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sejumlah kebijakan publik seperti penataan ruang, pengelolaan sampah, dan program bantuan sosial sering kali dilaksanakan tanpa konsultasi publik yang memadai. Hal ini berdampak pada munculnya resistensi pasif, ketidakpercayaan, dan kurangnya rasa memiliki terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pendidikan kritis sebagaimana dikembangkan oleh Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya membangun kesadaran warga melalui dialog, refleksi, dan aksi kolektif. Dalam konteks ini, forum diskusi masyarakat dapat menjadi sarana strategis untuk membangkitkan kesadaran kritis warga terhadap kebijakan publik, serta mendorong partisipasi yang lebih aktif dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun kesadaran kritis warga terhadap kebijakan publik melalui forum diskusi masyarakat?

2. Apa dampak forum diskusi terhadap peningkatan partisipasi warga dalam perumusan dan pengawasan kebijakan publik?

1.3 Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman warga terhadap kebijakan publik lokal.
- Mendorong dialog terbuka antara warga dan pemangku kepentingan.
- Menumbuhkan kesadaran kritis warga dalam merespons isu kebijakan secara konstruktif.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy)

Menurut Freire (1970), pendidikan seharusnya tidak bersifat "banking model" di mana pengetahuan ditransfer secara satu arah, tetapi sebagai proses dialogis yang membebaskan, membangun kesadaran kritis (*conscientization*) dan mendorong perubahan sosial. Warga tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk memahami, menilai, dan memengaruhi arah kebijakan.

2.2 Partisipasi dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik mencakup hak untuk mengetahui, memberikan masukan, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Arnstein (1969) dalam teorinya *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi memiliki tingkatan, mulai dari manipulasi hingga kendali warga. Kesadaran kritis diperlukan untuk mendorong warga naik ke tingkat partisipasi yang lebih substansial.

2.3 Forum Diskusi Masyarakat

Forum diskusi adalah bentuk partisipasi deliberatif yang memberikan ruang bagi warga untuk berdialog, bertukar pandangan, dan mengembangkan pemahaman bersama atas isu kebijakan. Menurut Habermas (1984), ruang publik yang rasional dan bebas dominasi menjadi fondasi penting bagi demokrasi deliberatif.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi dan Sasaran

Kegiatan dilaksanakan di tiga kelurahan di Kecamatan Tamalanrea, yaitu Kelurahan Bira, Tamalanrea Indah, dan Parangloe. Sasaran kegiatan adalah warga usia 20–60 tahun dengan latar belakang yang beragam (tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, pemuda, pelaku UMKM).

3.2 Metode Kegiatan

Metode pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan:

- **Sosialisasi dan Rekrutmen Peserta**

Dilakukan melalui koordinasi dengan lurah dan RT/RW setempat untuk menjaring peserta.

- **Pelatihan Pendidikan Kritis**

Materi mencakup pengantar kebijakan publik, peran warga dalam demokrasi, serta teknik menyampaikan aspirasi secara efektif.

- **Forum Diskusi Tematik**
- **Diskusi kelompok terfokus (FGD)** membahas isu aktual seperti kebijakan sampah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik.
- **Simulasi Audiensi dan Advokasi.** Warga berlatih menyampaikan pendapat dalam forum simulasi audiensi kepada perwakilan pemerintah.

3.3 Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui:

- Pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman warga.
- Kuesioner sikap terhadap partisipasi kebijakan.
- Observasi keaktifan dalam diskusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peningkatan Kesadaran Kritis

Data pre-test menunjukkan hanya 25% peserta memahami alur perumusan kebijakan publik. Setelah pelatihan dan diskusi, angka tersebut meningkat menjadi 82%. Peserta juga menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menyampaikan pendapat secara argumentatif.

4.2 Aktivasi Partisipasi Warga

Sebanyak 70% peserta menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam forum musyawarah kelurahan atau menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah setempat. Beberapa peserta menginisiasi pembentukan kelompok warga peduli lingkungan di RT masing-masing.

4.3 Tantangan dan Strategi

Tantangan utama adalah keterbatasan waktu warga dan masih adanya sikap apatis terhadap pemerintah. Strategi yang dilakukan adalah pendekatan personal dan pemilihan topik yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari warga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Forum diskusi masyarakat terbukti menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran kritis warga terhadap kebijakan publik di Kecamatan Tamalanrea. Pendidikan kritis yang berbasis dialog memungkinkan warga memahami proses kebijakan secara lebih baik dan mendorong partisipasi yang lebih aktif.

Saran

- Pemerintah daerah perlu menginstitutionalisasi forum diskusi warga sebagai bagian dari mekanisme konsultasi publik.

- Pendidikan politik warga sebaiknya dijadikan program berkelanjutan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang forum diskusi terhadap kebijakan publik lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada warga Kecamatan Tamalanrea, aparat kelurahan, dan Universitas Pejuang RI Makassar yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.